

**TINJAUAN MEDIASI DALAM PENENTUAN GANTI RUGI
PADA SENGKETA AGRARIA DALAM KASUS PERTAMINA VS
PANCORAN II**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Cinda Yanti

NIM : 205210188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN MEDIASI DALAM PENENTUAN GANTI RUGI
PADA SENGKETA AGRARIA DALAM KASUS PERTAMINA VS
PANCORAN II**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Cinda Yanti

NIM : 205210188

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama	CINDA YANTI
NIM	205210188
Program Studi	HUKUM
Judul Skripsi	Tinjauan Mediasi Dalam Penentuan Ganti Rugi Pada Sengketa Agraria Dalam Kasus Pertamina Vs Pancoran II
Title	Review of Mediation in Determining Compensation for Agrarian Disputes in the Pertamina Vs Pancoran II Case

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof
2. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H., Dr
3. ANDRYAWAN, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., M.H.,
Dr.
NIK/NIP: 10288010

Jakarta, 14-Januari-2025
Ketua Program Studi

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama	CINDA YANTI
NIM	205210188
Program Studi	HUKUM
Judul	Tinjauan Mediasi Dalam Penentuan Ganti Rugi Pada Sengketa Agraria Dalam Kasus Pertamina Vs Pancoran II

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Januari-2025

Pembimbing:
GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH.,
Dr.
NIK/NIP: 10268010



ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa agraria yang lebih berkeadilan, serta mendorong peningkatan implementasi mediasi dalam praktik hukum di Indonesia. Sengketa agraria menjadi salah satu permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, terutama ketika melibatkan konflik antara korporasi besar dan masyarakat lokal. Kasus Pertamina vs Pancoran II merupakan contoh konkret di mana mediasi digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa untuk menentukan besaran ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa agraria dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak. Fokus penelitian adalah bagaimana mediasi dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat Pancoran II, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa agraria secara damai dan efisien. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak, kapasitas mediator, serta dukungan regulasi yang memadai. Dalam kasus ini, masyarakat Pancoran II masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketimpangan kekuatan dengan pihak korporasi dan kurangnya pendampingan hukum yang optimal. Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak memerlukan pendekatan holistik, meliputi pemberian kompensasi yang adil, pengakuan hak atas tanah, dan jaminan keberlanjutan sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Sengketa agraria, mediasi, ganti rugi, perlindungan hukum, Undang-Undang Pokok Agraria

ABSTRACT

This study is expected to serve as a reference for stakeholders in formulating more equitable policies for resolving agrarian disputes and promoting the implementation of mediation in Indonesia's legal practice. Agrarian disputes are among the most complex legal issues in Indonesia, especially when involving conflicts between large corporations and local communities. The Pertamina vs Pancoran II case serves as a concrete example where mediation was employed as an alternative dispute resolution mechanism to determine the amount of compensation. This study aims to examine the effectiveness of mediation in resolving agrarian disputes and its implications for the legal protection of affected communities. The study focuses on how mediation can serve as an instrument to achieve substantive justice for the Pancoran II community and the extent to which legal protection is provided in accordance with the Basic Agrarian Law (Law No. 5 of 1960) and other related regulations. The findings reveal that mediation holds significant potential for resolving agrarian disputes amicably and efficiently. However, the success of mediation heavily depends on the goodwill of the parties involved, the competence of the mediator, and the adequacy of regulatory support. In this case, the Pancoran II community faces various challenges, including power imbalances with the corporate party and insufficient legal assistance. Moreover, legal protection for affected communities requires a holistic approach, encompassing fair compensation, land rights recognition, and social-economic sustainability guarantees.

Keywords: Agrarian dispute, mediation, compensation, legal protection, Basic Agrarian Law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Mediasi dalam Penentuan Ganti Rugi pada Sengketa Agraria dalam Kasus Pertamina vs Pancoran II”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan lebih lanjut. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan penulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen penguji Seminar Proposal yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., SS., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan penguji Diskusi Proposal yang telah memberikan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dari awal penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak karena sudah memberikan segalanya baik waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu saya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Dr. Herry Firmansyah, S.H., M.H., MPA., selaku dosen penguji seminar proposal dan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak ilmu dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Widodo selaku staf Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama di perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Keluarga tercinta, terutama orang tua, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral maupun material selama penulis menjalani masa pendidikan.
10. Teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, atas kebersamaan, diskusi, dan dorongan yang membantu selama proses penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai bentuk yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun memiliki peran penting dalam penyelesaian skripsi ini.

Jakarta, 3 Januari 2025

Penulis,



Cinda Yanti

Pernyataan

Nama	CINDA YANTI
NIM	205210188
Program Studi	HUKUM
Judul	Tinjauan Mediasi Dalam Penyelesaian Garis Rugi Pada Sengketa Agraria Dalam Kasus Pertamina vs Puncoran II

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Januari 2023
Yang menyatakan



CINDA YANTI
NIM 205210188

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. KERANGKA KONSEPTUAL	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORITIS	24
A. Teori Mediasi	24
B. Teori Ganti Rugi	31
C. Teori Perlindungan Hukum	34
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	42
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	42
B. Hak Milik dalam Hukum Agraria Indonesia	44
C. Kronologi Kasus Pertamina vs Pancoran II	48

D. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).....	52
BAB IV ANALISIS DATA	55
A. Mediasi Dapat Mempengaruhi Hasil Ganti Rugi dalam Kasus Sengketa Agraria	55
B. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Setempat yang Terdampak Adanya Kasus Pertamina vs Pancoran II	60
C. Analisis Berdasarkan Teori Mediasi	67
D. Analisis Berdasarkan Teori Ganti Rugi	68
E. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum	68
F. Implikasi Terhadap Kerangka Hukum Agraria.....	69
H. Penyelesaian Hukum yang Direkomendasikan	70
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	13
-----------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UUPA	adalah Undang-Undang Pokok Agraria
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
PERMA	adalah Peraturan Mahkamah Agung
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
PERMEN	adalah Peraturan Menteri
ATR/BPN	adalah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Letter of Accepted Journal Publication
Lampiran 5	Jurnal Karya Ilmiah
Lampiran 6	Surat Keterangan Plagiasi dan Hasil Turnitin Jurnal